Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 265 - 279	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

PUBLIC CONTRIBUTION ROADMAP ASTRA DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Rachmat Putro Ferdiawan¹, Ari Afriansyah², Santoso Tri Raharjo³, Nandang Mulyana⁴

^{1, 2} Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran

^{3, 4} Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial & Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran

(ferdiawan02@gmail.com)

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan melalui relasi harmonis dengan para pemangku kepentingan khususnya masyarakat sekitar. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan program tanggung jawab sosial (CSR) PT. Astra Internasional dalam membantu kesejahteraan sosial masyarakat. Beberapa indikator CSR untuk menggambarkan implementasi program tersebut adalah tujuan tanggung jawab sosial perusahaan, masalah sosial perusahaan, dan program hubungan perusahaan. Indikator kesejahteraan hidup terkait dengan kemajuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Peranan CSR kepada masyarakat dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan good corporate governance, good corporate citizenship dan good business ethics dalam sebuah entitas kehidupan dunia bisnis. Sejak awal perkembangannya Astra memiliki cita-cita untuk sejahtera bersama bangsa, dengan butir pertama dalam filosofi Catur Dharma Astra, yang berbunyi "Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara". Untuk meraih cita-cita ini, Astra terus merangsang upaya-upaya pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan dan berimbang baik itu dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan melalui Public Contribution Roadmap. Pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial Astra berpedoman pada pengembangan program empat pilar CSR Astra yang sejalan dengan hasil pemetaan sosial, dampak proses bisnis, dan Public Contribution Roadmap 2020. Dengan panduan Public Contribution Roadmap, Astra melaksanakan tanggung jawab sosial baik dalam pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) serta 4 pilar Corporate Social Responsibility (CSR) Astra yang berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Kata kunci: CSR, kesejahteraan sosial, pembangunan berkelanjutan

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) is a company's commitment to care for the environment and society in an effort to realize social welfare in a sustainable manner through harmonious relations with stakeholders, especially the surrounding community. This paper aims to describe the social responsibility (CSR) program of PT. Astra International in helping the social welfare of the community. Some CSR indicators to illustrate the implementation of the program are the objectives of corporate social responsibility, corporate social issues, and corporate relations programs. Life welfare indicators are related to progress in the fields of health, education, and economy. The role of CSR to the community can be seen as an effort to realize good corporate governance, good corporate citizenship and good business ethics in an entity living in the business world. Since the beginning of its development, Astra has aspirations for prosperity with the nation, with the first point in the philosophy of the Catur Dharma Astra, which reads "Being a Beneficial Property of the Nation and Country". To achieve this goal, Astra continues to stimulate Indonesia's sustainable and balanced growth efforts both in economic, social and environmental terms through the Public Contribution Roadmap. The implementation of Astra's social responsibility programs is guided by the development of Astra's four pillars of CSR in line with the results of social mapping, the impact of business processes, and the Public Contribution Roadmap 2020. With the guidance of the Public Contribution Roadmap, Astra implements social responsibility both in managing the Environment, Safety and Occupational Health (LK3) and the four pillars of Astra's Corporate Social Responsibility (CSR) which contribute to efforts to improve the welfare of the Indonesian people.

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 265 - 279	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

Keywords: *CSR, social welfare, sustainable development*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) selain menjadi salah satu cara perusahaan untuk membangun citra positif di mata masyarakat dan pemerintah dari para pelaku bisnis, juga merupakan alternatif pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Pelaksanaan program CSR yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh perusahaan merupakan bagian dari etika bisnis. Melalui kegiatan-kegiatan dari program CSR yang ditawarkan perusahaan, perusahaan ingin membantu pemerintah untuk bersama-sama mengatasi permasalahan sosial dimasyarakat serta melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan, misalnya pada peningkatan ekonomi dan pendidikan, serta kesehatan masyarakat.

Di samping itu penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Sudaryanto menyatakan, bahwa pelaksanaan program CSR memberikan implikasi positif dalam meringankan beban pemerintah untuk permasalahan biaya pembangunan, merangsang investasi dunia usaha, dan juga memperkuat jaringan kerja sama antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Kurniawan, 2013).

Peningkatan kesejahteraan sosial masih menjadi pekerjaan rumah bersama dan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan di bidang sosial terutama perlindungan kepada kelompok rentan. Penanganan yang tidak tepat terhadap kelompok-kelompok rentan dapat mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin luas, yang pada akhirnya akan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial, dan dapat mendorong terjadinya permasalahan sosial baru, bahkan menjurus pada ketidakharmonisan sosial. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, yang harus terus dilakukan yang diwujudkan dalam bentuk jaminan, bantuan, dan

pemberdayaan sosial, serta meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dan juga upaya peningkatan kemampuan dan keberdayaan melalui pendidikan. Namun demikian, dipahami bersama bahwa Indonesia sebagai negara berkebang, maka pemerintah memiliki sejumlah keterbatasan. Sehingga, pemerintah memerlukan dukungan sejumlah pihak untuk memujudkan tujuan tersebut.

Pembangunan sosial dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, diskriminasi, keterasingan, dan penanganan korban akibat bencana alam serta bencana sosial. Namun, realitasnya pembangunan yang dilaksanakan masih dihadapkan pada sejumlah rintangan dan permasalahan penting seperti keterbatasan anggaran, kurangnya efektivitas pelaksanaan bantuan dan pelayanan jaminan sosial, luasnya cakupan pelayanan, kejadian bencana alam dan sosial ataupun perubahan kondisi ekonomi yang sulit diprediksi. Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan ternyata belum dapat menggapai seluruh kelompok lapisan masyarakat masih menyisakan sejumlah persoalan khususnya pada perseorangan atau kelompok masyarakat yang terabaikan, kurang beruntung atau miskin, dan tidak dapat ikut menikmati hasil pembangunan secara layak.

Peningkatan kesejahteraan sosial akan sulit tercapai dan masyarakat memerlukan kesabaran lebih untuk menunggu dalam waktu yang sangat lama apabila hanya mengandalkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor penggerak utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan peran serta dari seluruh pihak dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkannya, salah satunya melalui bantuan dari program CSR perusahaan. Dalam melakukan kegiatan bisnisnya sebagai bagian dari masyarakat dan warga korporasi, perusahaan diharapkan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 265 - 279	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

memberikan kontribusi dan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Hal ini merupakan sebuah keharusan etis perusahaan terhadap masyarakat selain hanya mencari keuntungan. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan / *Corporate Social Responsibility (CSR)*, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam berbagai program kemasyarakatan (*community investment*).

CSR merupakan sebuah kesepakatan dari *World Summit on Sustainable Development (WS-SD)* di Johannesburg Afrika Selatan 2002 yang ditujukan untuk mendorong seluruh perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Peranan CSR dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan *good corporate governance, good corporate citizenship* dan *good business ethics* dari sebuah entitas bisnis. Sehingga perusahaan tidak cukup hanya memikirkan kepentingan *shareholder* (pemilik modal), tetapi juga mempunyai orientasi untuk memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders* (Mapisangka, 2009).

CSR merupakan pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasional bisnis mereka dan dalam interaksi dengan *stakeholders* berdasar atas prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Hal ini berkaitan langsung dengan masyarakat sekitar baik langsung atau tidak langsung akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Dampak negatif dari operasional bisnis perusahaan inilah yang menjadi salah satu alasan atau dasar kewajiban perusahaan melaksanakan CSR sebagai upaya balas budi. Tulisan ini mencoba mengungkapkan seberapa berdampak kegiatan CSR sebagai langkah kemitraan antara pemerintah dan perusahaan dalam memberi nilai manfaat bagi masyarakat terutama dalam peningkatan kesejahteraan sosial, dengan mengambil contoh kasus pada PT Astra Internasional Tbk. PT Astra Internasional Tbk merupakan salah satu perusahaan terbesar

di Indonesia dan tercatat telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya, telah banyak penghargaan yang diperoleh misalnya Asia's Best Companies (2017), Indonesia Best Corporate Social Initiative Program (2015), The Best Green CEO, Most Admired Company, 40 Emiten Terbaik versi Analisis, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui implementasi CSR pada PT Astra Internasional Tbk dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungan perusahaannya.

Menurut Kim (2000) praktek CSR perusahaan dapat diidentifikasi dalam berbagai tujuan, yakni hukum, ekonomi, moral, dan filantropi. Namun demi-kian, tujuan tersebut masih dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi aktual di masyarakat terkait dengan tekanan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan CSR yang sangat urgen khususnya di negara sedang berkembang adalah peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Oleh karena itu penerapan CSR di Indonesia pada dasarnya dapat diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat yang ber-basis usaha kecil dan menengah serta peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

METODE

Studi literatur dan dokumentasi, dengan dukungan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah buku, jurnal atau dokumen yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan teori-teori yang relevan dengan program CSR PT. Astra yaitu *public contribution roadmap* dari dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

PEMBAHASAN

Corporate Social Responsibility (CSR)

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 265 - 279	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

Pengertian dan Konsep CSR pada saat ini terus mengalami perkembangan, di Indonesia telah terdapat banyak kajian dan regulasi terhadap CSR seperti dalam UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman modal, UU mineral dan Batu bara dan lain sebagainya. Dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (disingkat UUPT) Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.”

Rumusan tentang CSR lebih luas lagi dikemukakan oleh para ahli yang memberikan tanggapan yang berbeda-beda diantaranya sebagai berikut: (Azheri, 2012)

- a. Menurut Davis dan Frederick mengatakan bahwa CSR adalah sebagai kewajiban organisasi bisnis atau perusahaan untuk mengambil sebagian laba dalam kegiatan usaha yang bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan disamping kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri.
- b. Farmer dan hogue (1988) lebih menekankan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk mampu memberikan apa yang masyarakat inginkan. Jadi perusahaan tidak hanya dapat menyediakan barang dan memberikan pelayanan terhadap pembeli barang saja tetapi juga ikut membantu memecahkan masalah -masalah seputar masyarakat.
- c. Mu'man (2005), CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

- d. Pengertian lain dikemukakan oleh Michael Hopkins (2003) menyebutkan bahwa CSR berkaitan dengan perlakuan perusahaan terhadap *stakeholders* baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan, termasuk lingkungan secara etis atau secara bertanggung jawab, memperlakukan dengan cara yang bisa diterimanya. Sedangkan secara sosial CSR meliputi tanggung jawab dibidang ekonomi dalam upaya menciptakan standar hidup lebih baik dengan tetap memelihara profitabilitas perusahaan.
- e. AG. Wenast Wuryana menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan oleh sebuah perusahaan dengan sedemikian rupa atau sesuai dengan acuan atau regulasi penerapan yang berlaku dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Berdasarkan dari teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat diketahui bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk rasa tanggung jawab dan kepedulian atas bisnis yang mereka para pelaku bisnis dirikan dan jalankan terhadap *stakeholder* yang harus diimplementasikan melalui pengambilan sebagian laba yang mereka dapat untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar perusahaan.

Selain itu pelaksanaan program CSR tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga perusahaan itu sendiri. Menurut Jackie Ambadar, pelaksanaan CSR memberi manfaat kepada perusahaan dalam hal: 1) pembentukan citra positif dari masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan; 2) perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal; 3) perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas; dan 4) perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal kritis dan mempermudah pengelolaan risiko (Ambadar, 2008).

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 265 - 279	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

Menurut Kim (2000) praktik CSR perusahaan dapat diidentifikasi dalam berbagai tujuan, yakni hukum, ekonomi, moral, dan filantropi. Namun demikian, tujuan tersebut masih dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi aktual di masyarakat terkait dengan tekanan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan CSR yang sangat *urgent* khususnya di negara sedang berkembang adalah peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Oleh karena itu penerapan CSR di Indonesia pada dasarnya dapat diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat yang berbasis usaha kecil dan menengah serta peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

CSR Kesejahteraan Sosial

CSR dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang membawa keuntungan baik itu kepada perusahaan maupun masyarakat sebagai *win-win solution*. CSR Kesejahteraan Sosial (CSR-Kesos) merupakan komitmen dan upaya dunia usaha untuk meminimalkan risiko keberadaan dunia usaha dan memaksimalkan kesejahteraan pemangku kepentingan dalam rangka penanganan tujuh prioritas penanganan masalah kesejahteraan sosial sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi yang ternyata masih belum sepenuhnya tertangani. Masih banyak pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) di Indonesia memerlukan bantuan dan dukungan untuk memperbaiki kondisi sosialnya agar meningkat dan mampu mengatasi persoalan yang mereka hadapi secara mandiri.

Pelaksanaan CSR-Kesos berprinsip: mutualisma, yaitu bahwa pelaksanaan CSR-Kesos didasarkan pada saling menguntungkan antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah;

sensitivitas, yaitu kepekaan dunia usaha atas masalah sosial yang ada sehingga lebih *responsive* dalam penanganan masalah sosial; inisiatif, yaitu bahwa CSR-Kesos dilaksanakan atas prakarsa perusahaan itu sendiri, bukan atas paksaan pihak tertentu; kemitraan, yaitu diperlukan kerjasama yang baik antara seluruh pihak yang terlibat; etika bisnis, bahwa pembiayaan yang dikeluarkan diperhitungkan sebagai biaya sosial; keberpihakan, yaitu CSR-Kesos dilaksanakan secara pro-aktif untuk mengadvokasi kepentingan dan kebutuhan orang yang dibantu (PPKS) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga; non-diskriminasi, bahwa makna kesejahteraan program CSR-Kesos dalam dirasakan oleh seluruh PPKS; dan keberlanjutan, yaitu CSR-Kesos dilaksanakan secara terus menerus sampai PMKS yang dibantu dapat mandiri dan tidak mengalami ketergantungan (Sanusi, 2015)

Untuk melaksanakan CSR-Kesos, Kementerian Sosial membentuk Forum CSR Kesos melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Forum CSR-Kesos bersifat nonpartisan, nirlaba, transparan, kolaboratif dan bermitra dengan pemerintah melalui Kementerian Sosial.

Menurut Permensos Nomor 13 Tahun 2012, fungsi forum CSR-Kesos adalah menyusun perencanaan kegiatan; menyinkronkan rencana; memadukan pelaksanaan; mengkoordinasikan dan memfasilitasi; memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumber daya; *monitoring*, evaluasi dan pelaporan; memberikan apresiasi dan penghargaan; dan memetakan data permasalahan kesejahteraan sosial (Pasal 7). Sedangkan prioritas CSR-Kesos meliputi: peningkatan penghasilan bagi keluarga miskin; pemberdayaan sosial bagi keluarga bermasalah sosial psikologis dan keluarga bermasalah sosial ekonomis; pelatihan keterampilan kerja bagi remaja putus sekolah, bagi perempuan rawan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 265 - 279	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

sosial ekonomi; kajian dan pengembangan model program tanggung jawab sosial dunia usaha; perbaikan rumah tidak layak huni; rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, wanita tuna sosial, anak nakal; perlindungan sosial bagi anak terlantar; *home care* bagi lanjut usia; pemberdayaan komunitas adat terpencil; penanganan korban bencana alam dan bencana sosial; dan perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan (Pasal 19).

Pelaksanaan CSR PT Astra Internasional Tbk

Pelaksanaan program CSR PT Astra Internasional Tbk diwujudkan dalam *Public Contribution Roadmap*, yang merupakan bentuk tanggung jawab dan kontribusi sosial Astra yang berkelanjutan. Didalam program ini mengalir cita-cita luhur sejak didirikannya Astra yaitu untuk “Sejahtera Bersama Bangsa”, dan Astra harus dapat memposisikan diri sebagai bagian dari ekosistem yang ada di Indonesia.

Public Contribution Roadmap ini setiap tahunnya memetakan secara terstruktur dan komprehensif langkah-langkah yang saling terkait dan berkelanjutan dalam menciptakan kontribusi sosial yang semakin memiliki nilai tambah dan bermanfaat. Implementasi kontribusi sosial Astra dilakukan oleh seluruh jajaran organisasi melalui program-program kontribusi sosial yang berkelanjutan yang berfokus pada empat pilar utama, yaitu Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan dan Kewirausahaan.

Public Contribution Roadmap merupakan pilar penyangga keberlanjutan perusahaan dalam mewujudkan Goal Astra 2020 menjadi kebanggaan bangsa. Pilar ini juga merupakan upaya pencapaian visi Astra untuk ‘menjadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial serta peduli lingkungan’. Dengan panduan *Public Contribution Roadmap*, Astra melaksanakan tanggung jawab sosial baik dalam pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (LK3) serta empat pilar *Corporate Social Responsibility* (CSR) Astra untuk berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan program-program tanggung jawab sosial Astra berpedoman pada pengembangan program empat pilar CSR Astra yang sejalan dengan hasil pemetaan sosial, dampak proses bisnis, dan *Public Contribution Roadmap 2020* dengan fokus program pada:

- ASTRA CERDAS sebagai pilar Pendidikan, pembinaan dan peningkatan kualitas:
 - Pendidikan Anak Usia Dini melalui “Senyum SAPA” (sahabat PAUD Astra),
 - pendidikan dasar dan menengah baik melalui pembinaan sekolah Adiwiyata maupun peningkatan mutu pendidikan kejuruan.
 - Pengembangan program Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas (IAABL) melalui pembentukan Pelopor IAABL di masing-masing perusahaan baik untuk internal maupun eksternal.
 Dan juga terdapat program lainnya seperti:
 - Guru Binaan
 - Paket Beasiswa
 - Donasi Tas
 - Donasi Sepatu
 - Rumah Pintar
- ASTRA KREATIF sebagai pilar Kewirausahaan, berfokus pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan wirausaha berbasis ekonomi kreatif, dukungan pemasaran, penguatan forum “AKU BISA” (Asosiasi Pelaku Usaha Kecil Binaan Astra) yang berfokus pada masyarakat dan penyandang disabilitas. Dan terdapt juga Lembaga Pengembangan Bisnis dan Lembaga Keuangan Mikro
- ASTRA HIJAU sebagai pilar Lingkungan, pengembangan Astra Forest sebagai area konservasi (Ruang Terbuka Hijau) dan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 265 - 279	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

perlindungan keanekaragaman hayati terpadu yang berkelanjutan. Bentuk Programnya seperti penanaman pohon, mangrove, ruang terbuka hijau, dan bank sampah

- ASTRA SEHAT sebagai pilar Kesehatan, implementasi program “Astra KIRANA” (Kesehatan Ibu, Remaja, dan Anak) dengan sasaran untuk peningkatan status kesehatan ibu, remaja, dan anak melalui kegiatan promosi pola hidup bersih dan sehat, perbaikan gizi, pembinaan posyandu, pengobatan gratis, persediaan kantong darah, dan Keluarga Berencana dengan penguatan Kader Kesehatan Astra.

Keempat pilar tersebut diimplementasikan melalui pembentukan Kampung Berseri (Bersih, Sehat, Cerdas & Produktif) Astra di masing-masing wilayah di Indonesia.

Pada tahun 2017, kontribusi sosial Astra semakin berkembang dengan baik melalui program empat pilar Kontribusi Sosial Astra yaitu Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan dan Kewirausahaan. Program-program di bidang kesehatan diantaranya meliputi pembinaan terhadap 1.698 posyandu, dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis bagi 132.180 pasien, donasi 237.121 kantong darah serta penyediaan 22.635 kacamata terutama bagi anak-anak di wilayah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal). Inisiatif untuk peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan memberikan kontribusi dalam bentuk bantuan dan pembinaan kepada 17.088 sekolah, pembinaan 45.549 guru dan penyaluran sebanyak 245.879 paket beasiswa yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Untuk program lingkungan, Astra menanam sebanyak 4,5 juta pohon. Sedangkan untuk program kewirausahaan, Astra & yayasannya telah membina 11.014 UMKM, dengan penerima manfaat sejumlah 100.941 orang serta membina 512 penyandang disabilitas. Program-program 4 pilar CSR Astra tersebut diimplementasikan

secara terintegrasi melalui 72 “Kampung Berseri Astra” yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Program CSR PT Astra dengan empat pilar program utama, terlihat merupakan program yang komprehensif, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Di atas kertas program CSR PT. Astra sudah lengkap dan menyentuh semua permasalahan utama masyarakat. Namun demikian, keempat sektor tujuan program CSR tersebut dapat saja menjadi kontra produktif manakala cara-cara atau pendekatan program tersebut tidak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Salah satu indikator utama keberhasilan penerapan prinsip pemberdayaan dalam program CSR adalah munculnya perbaikan dan peningkatan dari pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) sehingga berdaya dan mandiri secara berkelanjutan.

Prinsip-prinsip CSR yang mengedepankan mutualisma, sensitivitas, responsif; inisiatif, kemitraan, etika bisnis, keberpihakan, non-diskriminasi, dan keberlanjutan; sebenarnya sudah cukup untuk menjadi acuan pelaksanaan program CSR. Namun demikian masih terdapat prinsip-prinsip lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Ife (1995, 2012) tentang 22 prinsip pengembangan masyarakat, yang dapat melengkapi prinsip sebelumnya jika berkenaan dengan program CSR yang mengarah pada komunitas, yaitu:

1. Pembangunan Terpadu dan Seimbang; yaitu bahwa pembangunan masyarakat itu pada dasarnya melingkupi pembangunan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, kepribadian dan spiritual. Meskipun demikian, suatu komunitas memiliki keunikan tersendiri, sehingga menonjolkan aspek tertentu dalam pembangunannya. Namun demikian, aspek-aspek pembangunan prioritas tersebut harus selalu menjadi bahan pertimbangan sehingga

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 265 - 279	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

keputusan untuk lebih berkonsentrasi pada satu atau dua aspek tertentu dilakukan secara sadar dan sedapatnya merupakan pilihan komunitas sendiri (*self determination*), bukan keputusan yang ditetapkan oleh para perencana atau pekerja pengembangan komunitas yang didasarkan pada sekedar asumsi sepihak. Hal ini terkait dengan partisipasi dan kemandirian.

2. Menangani Ketimpangan Struktural, maksudnya adalah bahwa kegiatan atau program pengembangan komunitas bertujuan untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*). Setiap hambatan struktural seperti diskriminasi yang berbasis ras/etnik, agama, gender dsb harus diperhitungkan dan dieliminasi. Upaya pengembangan masyarakat harus selalu dipelihara agar tidak justru memperkokoh atau menciptakan hambatan-hambatan struktural tersebut.
3. Memahami dan berkomitmen terhadap hak-hak asasi manusia (*human rights*). Hal ini berarti bahwa sesungguhnya kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat harus mengedepankan hak-hak sipil dengan melindungi dan melaksanakan hak asasi manusia menjadi basis penting bagi pengembangan komunitas. Oleh karena pengembangan komunitas harus dirancang dengan basis pertimbangan agar tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.
4. Berkelanjutan (*Sustainability*); yaitu bahwa setiap upaya pengembangan masyarakat dan komunitas dilakukan harus dengan mempertimbangkan keberlanjutan di masa mendatang. Keberlanjutan secara ekologis dapat menghemat dan memelihara sumber daya lingkungan. Implikasi praktis dari prinsip ini adalah pertimbangan penggunaan sumber daya, gaya hidup, perlindungan sumber daya alam dan sebagainya; semuanya harus mempertimbangkan keberlanjutan.
5. Memiliki tujuan dan strategi Pemberdayaan (*Ewpowerment*); bahwa pemberdayaan haruslah menjadi satu bagian utuh dalam setiap upaya pengembangan masyarakat/komunitas. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilannya, serta kesempatan agar mampu mengakses sumber-sumber yang bermanfaat bagi mereka di masa mendatang. Masyarakat harus mampu (berdaya) memanfaatkan kapasitas dan potensi-potensi yang ada di sekitar mereka untuk mencapai kualitas dan kesejahteraan sosial.
6. Menghubungkan antara persoalan individu dengan struktural (*the personal and the political interlink*). Peningkatan Kesadaran Personal dan Politik; artinya bahwa pengembangan komunitas merupakan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesadaran politik para anggota komunitas, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik yang lebih luas sehingga mampu mendorong perubahan dan perbaikan sosial politik yang lebih luas lagi. Hal ini merupakan langkah awal paling krusial dalam peningkatan kesadaran (*consiousness raising*) yang menjadi salah faktor utama dalam pemberdayaan. Tanpa kesadaran dan peningkatan pemahaman komunitas akan kaitan antara pribadi dengan politik dan sebaliknya, maka upaya pengembangan komunitas mustahil terwujud.
7. Mengembangkan kepemilikan masyarakat (*community ownership*). Dengan berbasis kepemilikan (*asset-base*) dan peningkatan rasa memiliki (*sense of belonging*); bahwa pengembangan masyarakat/ komunitas juga harus berbasis pada aset yang dimiliki dan hal ini akan meningkatkan rasa memiliki-menghargai komunitas atas asetnya; atau menyediakannya jika belum tersedia. Berbasis aset dalam konteks ini dapat dilihat dari dua konsep yaitu: kepemilikan material dan kepemilikan atas struktur dan proses

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 265 - 279	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

yang dilakukan dalam komunitas. Menyadari dan memanfaatkan potensi-potensi komunitas adalah aspek penting dan mendasar dalam pembangunan komunitas karena hal itu akan meningkatkan jatidiri, menghargai potensi yang dimiliki komunitas dan lingkungannya. Inilah cara pandang kekuatan (*strength perspective*) yang melihat berbagai sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan masyarakat/komunitas. Pada akhirnya, anggota komunitas akan lebih terlibat dalam pengelolaan dan perolehan manfaat atas sesuatu yang menjadi milik bersama tersebut dan akan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Pengembangan masyarakat berbasis aset kepemilikan dan rasa kepemilikan atas struktur dan proses dalam komunitas sangat berkaitan dengan pengorganisasian komunitas. Program-program CSR dapat dikembangkan dengan berbasis pada potensi dan sistem sumber dari komunitas itu sendiri, jika tidak tersedia maka dukungan dan fasilitas yang relevan baru kemudian dilakukan. Desentralisasi nampaknya menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan sumber daya, ketrampilan dan peningkatan rasa percaya diri.

8. Mengembangkan keswadayaan masyarakat (*self-reliance*). Kemandirian atau keswadayaan; memiliki arti sikap percaya diri untuk sedapat mungkin menggunakan sumber daya yang tersedia dari dalam komunitas itu sendiri dan meminimalisasi penggunaan sumber daya dari luar. Prinsip ini juga berlaku pada setiap sumberdaya dari luar yang mungkin diperlukan oleh komunitas (finansial, teknologi, alam, dan sumberdaya manusia). Hal ini penting karena berkaitan pula dengan keberlanjutan program di masa mendatang.
9. Independensi dari negara (*independence from the state*). Independensi (dalam hubungan antara komunitas dengan

pemerintah); hal ini berkaitan dengan prinsip sebelumnya yaitu kemandirian. Masyarakat harus 'feel free' dalam hubungannya dengan pemerintah dan pihak lainnya di luar mereka sendiri. Banyak bukti menunjukkan bahwa upaya-upaya pengembangan komunitas yang disponsori atau terlalu banyak campur tangan pemerintah bukan memandirikan dan memberdayakan komunitas tetapi malah sebaliknya menciptakan ketergantungan dan pelemahan. Namun demikian peran pemerintah tetap diperlukan. Harus dicari rumusan yang tepat untuk bagaimana seharusnya Pemerintah terlibat dalam upaya pengembangan komunitas. Mungkin, untuk sementara dapat disebutkan bahwa dukungan Pemerintah dalam pengembangan komunitas hanya diperlukan sebagai pemulai (*starter*), atau mungkin juga sebatas 'pelumas' kelancaran kelancaran pengembangan masyarakat.

10. Memiliki tujuan jangka menengah dan visi ideal. Keselarasan antara pencapaian tujuan jangka pendek dengan visi masa depan. Sinkronisasi dan harmonisasi antara tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sesuai visi pengembangan masyarakat. Hal ini diperlukan agar capai pembangunan dapat terukur. Terlalu fokus pada tujuan jangka pendek, akan menguarah energi untuk tujuan jangka panjang. Sebaliknya, terlalu berfikir fokus pada tujuan jangka panjang akan membuat frustrasi, karena tujuan tidak pernah atau sulit tercapai. Masyarakat harus dibiasakan berfikir dan bekerja runtut, sedikit demi sedikit, sabar, dan konsisten. Langkah dan capaian dari perubahan besar dimulai dari langkah kecil terukur.
11. Berdasarkan inisiatif dan potensi pengembangan yang tumbuh dari masyarakat sendiri (*organic development*). Pendekatan ini; adalah lawan dari pembangunan sentralistik dan mekanistik kaku. Komunitas lebih bersifat organis seperti tumbuhan dan

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 265 - 279	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

berkembang daripada bersifat mekanistik seperti mesin, kaku. Upaya-upaya pengembangan masyarakat/ komunitas tidak dapat diatur dan dikendalikan dengan rumus-rumus teknis tetapi lebih merupakan suatu proses dinamika unik yang kompleks sesuai kondisi masyarakatnya. Pengembangan masyarakat/ komunitas lebih merupakan 'arts' wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi. Seringkali masyarakat memiliki kapasitas tersendiri untuk bergerak dan mengembangkan potensinya sendiri. Oleh karena itu upaya pengembangan komunitas lebih pada menyediakan kondisi dan situasi yang pas sehingga memungkinkan memanfaatkan dan mengembangkan potensi tersebut dengan lebih baik lagi.

12. Berdasarkan pada langkah-langkah pengembangan (*the pace of development*). Penentuan ritme atau tahapan pengembangan masyarakat; hal ini berarti bahwa komunitas sendirilah yang sebaiknya menentukan ritme atau irama tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan dinamika mereka. Terlalu memaksakan kegiatan pengembangan komunitas akan dapat memupus komitmen komunitas untuk tetap bertahan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan pengembangan komunitas hanya akan tercapai jika kecepatan & percepatan pembangunan dilakukan sesuai dengan ritme yang ada di komunitas itu sendiri. Masyarakatlah yang paling tahu iramahidup mereka. Keberhasilan setiap pekerja pengembangan komunitas lebih ditentukan oleh kemampuannya memperhitungkan irama hidup masyarakat. Namun demikian proses pembangunan dapat distimulasi dan didorong tetapi tidak memaksa untuk dipercepat atau diperlambat. Seringkali terjadi para perencana, pengelola, pekerja pengembangan komunitas, politikus, dan birokrat yang berkeinginan segera melihat hasil nyata dan terukur menjadi putus asa.

Inilah yang menyebabkan mengapa model pembangunan yang birokratis menjadi tidak sesuai untuk melaksanakan pengembangan komunitas. Sebaiknya program CSR yang diarahkan pada masyarakat harus benar-benar mempertimbangkan hal ini. Pengembangan komunitas adalah proses belajar bagi komunitas itu sendiri. Tantangan bagi pekerja pengembangan komunitas adalah mampu bersabar dan menahan diri sehingga tergoda untuk mempercepat proses dengan menggurui komunitas tentang apa yang harus dilakukan; atau bisa saja dengan cara yang sopan mengajukan saran-saran persuasif.

13. Memanfaatkan keahlian dari luar sesuai kebutuhan; Meskipun program pengembangan masyarakat (*community development*) harus mengutamakan sumberdaya (alam, manusia) setempat, namun keahlian orang luar sebaiknya dipergunakan untuk mencari alternatif pemecahan persoalan. Orang luar hanya akan bermanfaat dalam pengembangan masyarakat apabila mau bekerja dengan menghargai keunikan masyarakat yang ada, mendorong terjadinya komunikasi yang lebih setara dan proses saling belajar, serta tidak mendorong pilihan pemecahan masalah dari luar melainkan dari masyarakat sendiri
14. Memperkuat kesatuan masyarakat (*community building*). Kesatuan masyarakat artinya adalah masyarakat yang memiliki interaksi sosial yang kuat, hubungan komunikasi dan dialog yang baik, solidaritas dan pengertian, serta bisa mengembangkan aksi sosial yang diperlukan. Sebaliknya, masyarakat tanpa kesatuan artinya adalah masyarakat yang warganya individualistik, terpecah-pecah, dan merasa terpicil. Program pengembangan masyarakat (*community development*) harus memperkuat kesatuan masyarakat atau membuat sebanyak

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 265 - 279	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

mungkin orang terlibat dalam kegiatan bersama dan berinteraksi, baik secara formal maupun informal. Masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang orang-orangnya saling tergantung dan setiap orang merasa perlu berkontribusi karena juga memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (ekonomi, sosial, politik).

15. Menggunakan pendekatan proses dan hasil secara selaras. Mengutamakan hanya pada hasil, bisa menjustifikasi proses yang menggunakan cara-cara yang secara etik dan moral tidak bisa dibenarkan. Mengutamakan hanya pada proses, bisa kehilangan arah yang akan dicapai, mengabaikan struktur masyarakat yang ada, dan tidak memperhatikan dampak negatif dari suatu cara yang keliru. Program CSR yang menerapkan pengembangan masyarakat (*community development*) harus mengembangkan proses yang dikaitkan dengan tujuan dan visi, serta sebaliknya mencapai hasil yang dikaitkan dengan proses dan cara mencapainya. Keduanya selalu bersamaan

16. Keterpaduan Proses dengan tujuan, yaitu bahwa proses dan capaian/hasil dalam program pengembangan masyarakat (*community development*) merupakan dua hal yang sama penting. Karena itu perlu dikembangkan tahap-tahap proses yang satusama lain saling mendukung pencapaian tujuan. Untuk itu, evaluasi terhadap proses juga harus dilakukan secara kritis, terutama dgn menggunakan kriteria-kriteria masyarakat, bukan dari profesional atau tenaga ahli. Keterpaduan proses juga harus dipandang dari adanya persesuaian dan keterhubungan antara satu proses yang digunakan dalam melaksanakan satu bagian kegiatan dengan proses yang digunakan dalam melaksanakan bagian kegiatan lainnya. Dengan demikian bagian-bagian kegiatan dalam keseluruhan pengembangan

komunitas tidak sekedar fragmen-fragmen terpisah yang tidak terikat satu sama lain.

17. Anti- Kekerasan (*Non Violence*). Program pengembangan masyarakat (*community development*) bertujuan untuk mencapai masyarakat yang damai, karena itu proses dalam program juga harus dengan cara yang damai (anti kekerasan). Salahsatu konsekuensi dari prinsip ini adalah adanya perhatian terhadap bentuk-bentuk kekerasan di masyarakat, baik yang bersifat perorangan, keluarga, institusi, maupun struktural, misalnya: kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, aparat polisi, militer, kekerasan dalam rumah tangga, rasisme, diskriminasi seksual; yang biasanya dilakukan oleh orang atau kelompok dominan terhadap yang lemah.

Untuk mencapai komunitas yang kuat berbasis anti kekerasan, maka proses-proses anti kekerasan harus diutamakan. Mustahil proses yang mengandung kekerasan dapat menghasilkan sesuatu yang tidak mengandung kekerasan. Dalam hal ini anti kekerasan tidak saja dipahami sebagai tiadanya kekerasan fisik diantara sesama anggota komunitas tetapi termasuk tiadanya kekerasan struktural dimana suatu struktur sosial dan kelembagaan yang ada yang justru menjadi sumber kekerasan. Membiarkan adanya tekanan dari seseorang/ pihak/ kelompok kepada orang/ pihak/ kelompok lain di dalam suatu komunitas dan atau pemaksaan kehendak sama saja dengan membiarkan adanya kekerasan didalam komunitas.

18. Pengikutsertaan (*Inclusiveness*). Bersifat inklusif (terbuka terhadap semua kalangan, baik pihak yang pro maupun kontra). Program pengembangan masyarakat (*community development*) seharusnya tidak bersifat eksklusif(elitis) melainkan inklusif(terbuka bagi siapa saja) bahkan terhadap pihak yang mengkritik atau kontra.

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 265 - 279	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

Hal ini juga terkait dengan prinsip antikekerasan, misalnya: tidak menggunakan cara provokasi dan merespon provokasi pihak lain dengan cara damai, mencoba memahami posisi dan pandangan orang lain (termasuk pengkritik atau pihak yang kontra), selalu melihat pihak lain sebagai potensi, selalu bersedia merefleksi pandangannya sendiri, menghargai perbedaan pendapat, dsb

19. **Konsensus (Mufakat).** Berdasarkan konsensus dalam pengambilan keputusan, yaitu bahwa cara-cara yang antikekerasan juga memiliki konsekuensi penggunaan proses pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan (konsensus) harus menjadi tradisi dalam program pengembangan masyarakat. Pendekatan konfrontatif dan mempolarisasi parapihak (salah-benar, pro-kontra, kelompok hitam-kelompok putih) harus dihindari. Tapi kembangkanlah semua pihak adalah pemenang. Implementasi prinsip anti kekerasan dan pengikutsertaan (*inclusiveness*) memerlukan dasar-dasar pengambilan keputusan secara mufakat. Satu kelebihan cara pengambilan keputusan secara mufakat adalah begitu keputusan diambil maka semua pihak akan merasa memiliki keputusan itu dan lebih dipastikan semua pihak akan cenderung menjaga dan mematuhi keputusan itu secara mandiri.
20. **Mengembangkan dan membangun kerjasama;** bahwa program pengembangan masyarakat (*community development*) menekankan pada struktur masyarakat yang mau dan mampu bekerjasama, bukan menekankan pada kompetisi, yang harus dibangun. Persaingan adalah nilai yang banyak dianut dalam sistem pendidikan di masyarakat dan di sekolah, yang mendorong manusia untuk bersifat individualistik dan mengejar kemajuan tanpa solidaritas sosial. Hal ini menjadi tantangan program CSR yang memberdayakan.
21. **Partisipatif,** bahwa program pengembangan masyarakat (*community development*) harus memaksimalkan keterlibatan banyak orang dalam proses dan kegiatannya. Dengan demikian, kepemilikan program dan inklusifitas bisa terjadi. Seringkali sebagian dari pengelola program CSR berfikir bahwa partisipasi itu berarti berbentuk ikut serta dalam pertemuan dan kegiatan yang ada dalam suatu program, atau masyarakat bersedia menjadi relawan/ kader dalam program. Padahal, cara orang berpartisipasi, tidak sama. Partisipasi sebenarnya punya arti luas, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan di luar kegiatan program tetapi sebenarnya juga berarti mendukung dan memanfaatkan hasil-hasil program, itu juga harus dianggap penting. Pengembangan komunitas harus selalu memaksimalkan partisipasi dimana setiap orang didalam komunitas itu dapat dilibatkan dalam proses dan kegiatan komunitas. Semakin banyak orang berpartisipasi aktif, semakin tinggi rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap apa yang sudah dimiliki dan apa yang sedang diupayakan oleh komunitas. Partisipasi tidak berarti bahwa semua orang harus terlibat di dalam semua hal. Setiap orang memiliki kepentingan, ketrampilan dan kapasitas berbeda dan partisipasi hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan hal tersebut. Jika dalam suatu masyarakat belum terbentuk partisipasi, maka program utamanya adalah membangun dan mengembangkan partisipasi, yaitu membangun kemauan, kemampuan, dan kesempatan untuk berpartisipasi pada suatu kegiatan kemasyarakatan.
22. **Merumuskan dan menyepakati ‘kebutuhan’ secara bersama.** Program pengembangan masyarakat (*community development*) adalah upaya untuk mengembangkan proses dan struktur masyarakat yang mampu menyelenggarakan kebutuhan anggota

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 265 - 279	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

masyarakatnya dengan memperhatikan perspektif ekologi dan keadilan sosial. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan: (1) Keberagaman kebutuhan di dalam masyarakat harus diidentifikasi; dan (2) Pengertian kebutuhan itu harus dirumuskan oleh masyarakatnya sendiri berdasar kesepakatan.

Banyak cara konvensional untuk mendefinisikan kebutuhan. Para penentu kebutuhan yaitu: para ahli, perencana, dan pengelola pembangunan, konsultan, pekerja pengembangan komunitas dan sejenisnya sering memiliki pandangan dan bahkan kepentingan tertentu dalam menentukan kebutuhan komunitas. Itulah sebabnya terlalu sering terjadi dimana perencanaan pembangunan mengandung bias para ahli (expert bias). Celaknya bias ini selalu saja terulang.

Untuk mengatasi hal itu sedapat mungkin proses penentuan kebutuhan dilaksanakan secara partisipatif untuk mencapai konsensus antara para ahli penentu kebutuhan dengan komunitas. Komunitas dimungkinkan mendefinisikan dan menyatakan kebutuhan yang mereka rasakan. Di sinilah perlunya instrumen-instrumen perencanaan partisipatif.

Banyak metode yang telah dikembangkan untuk perencanaan partisipatif tersebut, diantaranya: PRA (Participatory rapid Appraisal), PLA (Participatory Action and Learning), OOPP (Objective Oriented Project Planning) dan sejenisnya. Penggunaan metode dan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif seperti ini hendaknya diutamakan dalam merencanakan pengembangan komunitas daripada penggunaan metode dan pendekatan perencanaan pembangunan konvensional.

Dari 22 prinsip-prinsip pengembangan masyarakat (*Community Development*) di atas maka dapat dijelaskan secara singkat langkah-langkah penting dari konsep *Community Development* (CD) tersebut :

1. Keikutsertaan masyarakat dalam mengungkapkan kebutuhan dasar kehidupannya didalam proses perencanaan daerah
2. Penentuan prioritas pembangunan daerah
3. Pelibatan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah
4. Penyediaan fasilitas dan utilitas oleh pihak swasta dalam pemenuhan kewajibannya
5. Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi/ memantau pelaksanaan pembangunan daerah termasuk pembangunan oleh pihak swasta
6. Prioritas dalam pemanfaatan fasilitas dan utilitas permukiman serta pemeliharaannya
7. Keberlangsungan kehidupan perusahaan
8. Keberlanjutan sumber daya alam & kelestarian lingkungan
9. Kepastian hukum dan pelayanan administrasi usaha
10. Pengembangan perencanaan selanjutnya

PENUTUP

Corporate Social Responsibility (CSR) pada umumnya merupakan bentuk tanggung jawab dan kepedulian atas bisnis yang didirikan. Praktik CSR dapat memberikan dampak positif terhadap perusahaan seperti membangun citra positif, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, dan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal kritis serta mempermudah pengelolaan risiko.

Namun praktik CSR dalam sudut pandang kesejahteraan sosial menilai bahwa

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 265 - 279	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

CSR harus bersifat mutualisma, dimana praktik CSR tidak hanya menguntungkan perusahaan saja melainkan juga wajib membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Praktik CSR Astra diwujudkan pada programnya yaitu *Public Contribution Roadmap*, yang merupakan bentuk tanggung jawab dan kontribusi sosial Astra yang berkelanjutan yang berfokus pada empat pilar utama, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan dan kewirausahaan. Dan keempat pilar tersebut diimplementasikan melalui pembentukan Kampung Berseri (Bersih, Sehat, Cerdas & Produktif) Astra di masing-masing wilayah di Indonesia. Kebutuhan sumberdaya manusia yang mumpuni untuk mewujudkan tujuan dari program CSR tersebut menjadi hal yang sulit untuk ditawarkan lagi, khususnya dalam upaya mencapai tujuan program CSR yang dimaksud.

Setidaknya program *Public Contribution Roadmap* tersebut merupakan langkah awal yang baik dalam upaya membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat serta juga dapat menanamkan nilai-nilai luhur sejak didirikannya Astra yaitu untuk “Sejahtera Bersama Bangsa”.

Daftar Pustaka

- Ambadar. (2008). Corporate Social Responsibility: dalam Praktek di Indonesia, Wujud Kepedulian Dunia Usaha. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Andjarwati, A. L. (2008). ETIKA BISNIS DAN PERILAKU ETIS MANAJER PENGARUHNYA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PADA LINGKUNGAN SOSIAL. Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 1, 1-13.
- Azheri, B. (2012). Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djasmin, S. (2017). Performa (Laporan Tahunan). Jakarta: Asuransi ASTRA.
- Farmer, Richard N. & Dickerson W. Hogue. 1988. Corporate Social Responsibility, Toronto: DC Healt and Company.
- Harjito, A. (n.d.). ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. Jurnal Hukum Islam Al Mawarid Edisi 8, 118-127.
- Hopkins, Michael. 2003. The Business Case for CSR: Where are we? International Journal for Business Performent Management, Volume 5. Number 2.3.
- Ife, J., & Ife, J. (2012). *Principles and dimensions of community development. In Human Rights from Below* (pp. 29–66). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511808340.003>
- Ife, JW; Tesoriero, F – 2006. *Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation*. Pearson Education
- Kim, K.S. (2000). *Corporate Social Responsibility And Strategic Management: An Empirical Study of Korean MNCs in The United States. Unpublished Dissertation*. West Heaven, Connecticut: The University Of Heaven.
- Kurniawan. (2013). Analisis Implementasi CSR Pada PT. Newmont Nusa Tenggara Dalam Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Lokal. (Skripsi Jurusan Akuntansi, FEB, Universitas Hasanuddin, Makassar)
- Mapisangka, A. (2009). Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat. JESP Vol. 1 No. 1, 39-47.

Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat	e ISSN : 2581-1126 p ISSN : 2442-448X	Vol 7, No: 2	Hal: 265 - 279	Agustus 2020
---	--	--------------	----------------	--------------

Mondy, R. Wayne. Manajemen Sumber Daya Manusia. 2009. Erlangga. Jakarta

Nuryana, Mu'man (2005), Corporate Social Responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan, makalah yang disampaikan pada Diklat Pekerjaan Sosial Industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Lembang 5 Desember

Salsabila Sarafina, M. S. (2017). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN NILAI PERUSAHAAN (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek). Jurnal administrasi Bisnis (JAB) Vol. 50, 108-117.

Sanusi, A. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan kelima. Jakarta: Salemba

Yustiani, S. (2010). ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA : TEORI DAN REALITAS. Jurnal Manajemen, Vol. 10, 1-10.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Republik Indonesia, 2007. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas. Jakarta: Kementerian Sosial.

Suharto, E. 2008. Corporate Social Responsibility: What is and Benefits for Corporate. CSR (Corporate Social Responsibility: Strategy, Management, and Leadership. Jakarta: Intipesan.

<https://www.asuransiastra.com/corporate/csr>

<https://www.astra.co.id/CSR/Overview>

<https://www.astra.co.id/About-Astra>